



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 102 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 77 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN BANYURESMI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 77 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 77 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 77 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 77);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 77 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN BANYURESMI TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 77 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 77) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 102

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 102 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 77
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA KECAMATAN BANYURESMI
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023	1

Berdasarkan pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perubahan RKPD meliputi Perubahan :

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Program dan Kegiatan yang diperlukan serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2023, Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah ditetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuwesmi Tahun 2023	4

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuwangi Tahun 2023	6

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten

- Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
31. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar PD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja PD Tahun 2023.

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023</i>	8

2. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Banyuresmi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, dan pagu perubahan renja tahun 2023.

- 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan
- 3.2 Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Semula dan Menjadi

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023</i>	10

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Banyuresmi sampai
dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra**

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana strategis dan rencana tahunan Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi Anggaran Program Renstra

Realisasi anggaran Renstra merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran Renstra Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023</i>	11

Renstra SKPD/Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut
Tahun 2019-2024 Sampai Triwulan II Tahun 2023

URUSAN DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
URUSAN KEWILAYAHAN	4,123,190,295	36,03	1,485,498,888
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,271,512,510	34,53	1,129,588,188
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,733,000	34,08	3,998,200
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,282,581,455	41,03	936,522,343
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12,862,500	39,83	5,122,500
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	198,129,908	34,57	68,493,400
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	616,669,589	8,89	54,842,053
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51,424,779	34,01	17,489,692
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,110,950	43,95	43,120,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	289,650,800	36,13	104,650,300
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	104,994,750	2,86	3,000,000
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	202,872,390	50,11	101,650,300
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	74,945,955	26,49	19,853,200
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	74,945,955	7,28	5,453,200
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	0	0	14,400,000
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	122,493,945	89,26	109,334,500
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	122,493,945	53,83	65,934,500
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	0	43,400,000

URUSAN DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	269,902,605	30,82	83,181,600
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	269,902,605	30,82	83,181,600
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	76,468,140	50,86	38,891,100
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	76,468,140	50,86	38,891,100
	4,123,190,295,00		1,485,498,888

Sumber : Perubahan RENSTRA skpd/KECAMATAN Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif Renstra Tahun 2023 terhadap realisasi APBD TA. 2023, dari total pagu indikatif Renstra Tahun 2023 sebesar Rp. 4,123,190,295,00 melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2022 dalam pelaksanaannya pada APBD TA. 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1,485,498,888 atau sebesar 36,03%.

2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENSTRA

Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RENSTRA dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian RENSTRA s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah 50,05% untuk target kinerja dan 47,77% untuk target anggaran.

Tabel 2.2
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program RENSTRA Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023	13

Sampai Triwulan II Tahun 2023

URUSAN DAN PROGRAM	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
URUSAN KEWILAYAHAN	50,05%	47,77%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	53,00 %	54,00 %
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54,00 %	44,00 %
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58,00 %	55,00 %
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35,00 %	33,00 %
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	58,00 %	47,00 %
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56,00 %	53,00 %
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57,00 %	50,00 %
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52,00 %	78,00 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	54,00 %	59,00 %
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	51,00 %	57,00 %
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	56,00 %	60,00 %
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	28,00 %	20,00 %
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan	25,00 %	0,06 %
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	25,00 %	1,00 %
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0	0
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	0	0
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	61,00 %	64,00 %
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	68,00 %	54,00 %
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	0

URUSAN DAN PROGRAM 1	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
	2	3
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	58,00 %	50,00 %
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	58,00 %	50,00 %
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	60,00 %	58,00 %
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25,00 %	21,00 %
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	25,00 %	24,00 %
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	0

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

2.2.1. Realisasi Anggaran Program Renja

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran
Renja Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Tahun 2023
Sampai Triwulan II Tahun 2023

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
URUSAN KEWILAYAHAN	3.205.118.092	46,35	1,485,498,888
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.405.648.392	46,96	1,129,588,188
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.733.000	34,08	3,998,200
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	2.068.397.347	45,28	936,522,343

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
Daerah			
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.122.500	100,00	5,122,500
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.987.200	47,90	68,493,400
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.362.700	95,61	54,842,053
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.203.445	45,78	17,489,692
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.842.200	52,69	43,120,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	289.650.800	36,13	104,650,300
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	87.577.800	3,43	3,000,000
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	202.073.000	50,30	101,650,300
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.000.000	49,63	19,853,200
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.000.000	54,53	5,453,200
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	30.000.000	48,00	14,400,000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	177.818.700	61,49	109,334,500
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	120.700.100	54,63	65,934,500
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	57.118.600	75,98	43,400,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	215.000.200	38,69	83,181,600
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	215.000.200	38,69	83,181,600

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	77.000.000	50,51	38,891,100
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	77.000.000	50,51	38,891,100
JUMLAH	3.205.118.092	46,35%	1,485,498,888

Sumber : RKPD Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran Renja pada Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan bidang urusan pemerintahan adalah 46,35%. Realisasi Renja sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.

2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENJA

Tingkat capaian RENJA diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RENJA Tahun 2023, capaian rata-rata RENJA Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 25,10% untuk target kinerja, dan 46,35% untuk target anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RENJA dimaksud adalah :

Tabel 2.4
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Renja Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Tahun 2023
Sampai Triwulan II Tahun 2023

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023</i>	17
--	----

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
URUSAN KEWILAYAHAN	25,10%	46,35
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20,19	34,08
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,20	45,28
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41,03	100,00
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39,83	47,90
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	33,29	95,61
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25,86	45,78
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34,01	52,69
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9,30	36,13
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17,17	3,43
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2,86	50,30
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	24,57	49,63
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10,13	54,53
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0	0
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	54,53	48,00
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	48,00	61,49
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	43,36	54,63
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	72,81	75,98
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	16,70	38,69
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30,82	38,69
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	30,82	50,51
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	39,61	50,51
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0	0
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85,72	46,35

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
Jumlah		

Sumber : Renja Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2023

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Banyuresmi Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2023 tersaji dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2. 5

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Banyuresmi Sampai dengan Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Banyuresmi

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN		100	99	3,065,021,754	2,886,354,642	95.02	6,355,570,923	1,485,504,988	34.57
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	97	2,496,416,838	2,594,083,338	93,78	2.405.648.392	1,129,588,188	20,19

7	1	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	100	5,143,400	5,143,400	100	11,733,000	3,998,200	16,20
7	1	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	100	5,143,400	5,143,400	100	1,000,000	-	45,29
7	1	1	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	-	0	0	n/a	1,000,000	-	0
7	1	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	-	0	0	n/a	1,000,000	-	0
7	1	1	201	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	-	0	0	n/a	1,000,000	-	0

7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	-	0	0	n/a	1,000,000	401,800	40,18
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	-	0	0	n/a	1,000,000	1,000,000	100
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	96	2,134,649,368	2,134,649,368	91,36	2,068,397,347	936,522,343	15,44
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	96	2,134,649,368	2,134,649,368	91,33	2,037,873,947	923,005,383	15,44
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	100	6,584,200	6,584,200	100	30,523,400	13,516,960	67,03

7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	100	0	0	0	5,122,500	5,122,500	39,83
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	100	0	0	0	5,122,500	5,122,500	39,83
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	100	130,121,575	130,121,575	99,95	142,987,200	68,493,400	19,55
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	100	7,774,500	7,774,500	99,51	8,162,500	3,457,700	16,92
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	100	42,767,800	42,767,800	99,99	36,200,200	19,184,100	11,03

7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	100	6,296,625	6,296,625	99,96	5,494,900	1,774,000	22,46
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	100	21,482,250	21,482,250	100	21,556,200	10,694,200	25,82
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	100	4,610,400	4,610,400	100	4,813,800	2,440,800	25,21
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	100	24,000,000	24,000,000	100	25,134,000	12,567,000	24,93
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	100	23,190,000	23,190,000	100	33,000,000	9,750,000	14,27

7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100		0	0	n/a	8,625,600	8,625,600	100
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	100	61,503,600	61,503,600	100	57,362,700	54,842,053	25,86
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	100	13,853,800	13,853,800	100	28,745,200	26,809,800	34,04
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	100	47,649,800	47,649,800	100	28,617,500	28,032,253	21,02
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	100	0	0	0	22,102,000	0	0

7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	98	47,589,595	47,589,595	95,63	38,203,445	17,489,692	34,01
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	91	11,999,715	11,999,715	82,68	12,599,745	6,888,092	54,67
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	100	7,630,000	7,630,000	100	7,910,000	1,420,000	17,72
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	100	27,959,880	27,959,880	99,99	17,693,700	9,181,600	29,80
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	100	117,409,300	215,075,800	99,58	81,842,200	43,120,000	9,30

7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	100	20,740,000	20,740,000	98,74	19,740,000	9,120,000	41,88
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	100	18,312,000	18,312,000	100	10,000,000	4,000,000	16,78
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	100	0	0	0	52,102,200	30,000,000	57,14
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	100	78,357,300	149.977.131	99,65	0	0	0
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	100	0	0	0	0	0	0

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100	100	245,537,100	245,537,100	100	289,650,800	104,650,300	17,17
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100	100	58,200,000	58,200,000	100	87,577,800	3,000,000	2,86
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100	100	58,200,000	58,200,000	100	87,577,800	3,000,000	2,86
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100	100	187,337,100	187,337,100	100	202,073,000	101,650,300	24,57

7	1	2	2.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100	100	47,124,300	47,124,300	100	27,000,000	8,764,900	17,71
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100	100	140,212,800	140,212,800	100	175,073,000	92,885,400	60,55
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100		0	0	0	10,000,000	19,853,200	10,13
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100		0	0	0	10,000,000	5,453,200	54,53
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100		0	0	0	10,000,000	5,453,200	54,53
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100	100	0	0	0	30,000,000	14,400,000	48

7	1	3	2.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100	100	0	0	0	30,000,000	14,400,000	48
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100	100	94,800,000	94,800,000	100	120,700,100	109,334,500	43,36
7	1	4	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100	100	94,800,000	94,800,000	100	120,700,100	65,934,500	72,81
7	1	4	7.03	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100	100	94,800,000	94,800,000	100	70,700,000	17,624,400	19,47
7	1	4	7.03	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100	-	0	0	0	50,000,100	48,310,100	96,62
7	1	4	7.04		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100	0	0	0	0	57,118,600	43,400,000	43,40

7	1	4	7.04	1	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100	-	0	0	0	57,118,600	43,400,000	43,40
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100	100	218,081,800	218,081,800	100	215,000,200	83,181,600	30,82
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100	100	218,081,800	218,081,800	100	215,000,200	83,181,600	30,82
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100	100	18,081,700	18,081,700	100	15,000,000	-	

7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100	100	200,000,100	200,000,100	100	200,000,200	83,181,600	39,61
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	100	100	51,474,000	51,474,000	99,98	77,000,000	38,891,100	85,72
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	100	-	51,474,000	51,474,000	99,97	77,000,000	38,891,100	85,72
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	100	-	27,576,000	27,576,000	99,97	27,000,000	10,311,100	45,37
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	100	-	0	0	0	20,000,000	13,580,000	67,90
7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	100	-	12,510,000	12,510,000	100	0	0	0
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	100	-	11,388,000	11,388,000	100	15,000,000	15,000,000	100
7	1	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	100	-	0	0	0	15,000,000	0	0

Sumber : Laporan Evaluasi renja triwulan II

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuwesmi Tahun 2023	32

Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023 menunjukkan dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 3.205.118.092 ,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasi sebesar Rp 1,485,498,888,00 atau mencapai 46,00%. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 6
Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023 Sampai Dengan Triwulan II

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
7 01 01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,416,927,723	1,129,588,188	20.19
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,733,000	3,998,200	16.20
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,733,000	2,596,400	45.29
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,000,000	-	-
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,000,000	-	-
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,000,000	-	-
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,000,000	-	-

7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,000,000	401,800	40.18
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,000,000	1,000,000	100.00
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,282,581,455	936,522,343	41.03
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,269,368,045	923,005,383	40.67
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13,213,410	13,516,960	102.30
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12,862,500	5,122,500	39.83
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12,862,500	5,122,500	39.83
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	205,755,508	68,493,400	33.29
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.163.225	3,457,700	42.36
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.829.090	19,184,100	20.02
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.898.310	1,774,000	22.46
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.556.363	10,694,200	49.61
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	4.840.920	2,440,800	50.42

	undangan			
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.200.000	12,567,000	49.87
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.642.000	9,750,000	28.98
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	8,625,600	8,625,600	100.00
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	212,084,801	54,842,053	25.86
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	78.750.000	26,809,800	34.04
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	133.334.801	28,032,253	21.02
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51,424,779	17,489,692	34.01
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12.600.000	6,888,092	54.67
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.011.500	1,420,000	17.72
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.813.279	9,181,600	29.80
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,110,950	43,120,000	9.30
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21,777,000	9,120,000	41.88
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa	23,835,000	4,000,000	16.78

	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan			
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52,498,950	30,000,000	57.14
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	307,867,140	104,650,300	17.17
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	104,994,750	3,000,000	2.86
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	104,994,750	3,000,000	2.86
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	202,872,390	101,650,300	24.57
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	49,480,515	8,764,900	17.71
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	153,391,875	92,885,400	60.55
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	124,945,955	19,853,200	10.13
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	74,945,955	5,453,200	54.53
7 01 03 2.01 03	Sub Kegiatan Peningkatan	15,432,900	5,453,200	54.53

	Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
7 01 03 2.01 04	Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	59,513,055		-
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.000.000		-
7 01 03 2.02 01	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000		-
7 01 03 2.03	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.000.000		
7 01 03 2.03 01	Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000		
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	30,000,000	14,400,000	48.00
7 01 03 2.05 02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	30.000.000	14,400,000	48.00
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	190,560,000	109,334,500	43.36
7 01 04 7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90,560,000	65,934,500	72.81

7 01 04 7.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	90.510.000	17,624,400	19.47
7 01 04 7.03 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000	48,310,100	96,620
7 01 04 7.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100,000,000	43,400,000	16.70
7 01 04 7.04 01	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	100,000,000	43,400,000	43.40
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	269,902,605	83,181,600	30.82
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	269,902,605	83,181,600	30.82
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.402.500	-	-

7 01 05 2.01 07	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	52.500.000		-
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	210.000.105	83,181,600	39.61
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	45,367,500	38,891,100	85.72
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45,367,500	38,891,100	85.72
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	22,725,000	10,311,100	45.37
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	20,000,000	13,580,000	67.90
7 01 06 2.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15,000,000	15,000,000	100.00
7 01 06 2.01 18	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7,642,500	-	00,00 %

Sumber : Evaluasi Renja Triwulan II

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 6 sub kegiatan yang tidak mencapai target, hal ini dikarenakan waktu pelaksanaannya dilaksanakan setelah triwulan II Selain itu, terdapat 5 sub kegiatan yang sudah mencapai target yang disebabkan karena waktu pelaksanaannya dilaksanakan dalam kurun waktu triwulan I dan II.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan actor atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Banyuresmi. adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Banyuresmi Pada **Tahun 2023 (TW II)** berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Banyuresmi Pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Banyuresmi Berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan/SKPD.

Selain itu, terkait perlu adanya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Adapun factor perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut diatas antara lain :

- 1. Adanya kebijakan efesiensi anggaran dari pemerintah kabupaten Garut,
- 2.Adanya kebijakan perubahan anggran secara parsial dari pemerintah kabupaten Garut,
- 3. Adanya kebijakan pencabutan status PPKM dari pemerintah pusat,
- 4. Adanya subkegiatan yang telah selesai dengan menggunakan anggaran yang relative lebih kecil.

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini :

Tabel 2. 7

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Tahun 2023 TW II

No	sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten /kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I	II	III	IV																	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1		3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100%		15
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	400	14,211,517,546	194	6,609,404,916	100.00	5,416,927,723	7.64	413,928,146	12.55	679,562,842	-	-	-	-	20.19	1,129,588,188	214	7,738,993,104	42.79	1,547,798,621	Kecamatan Banyuresmi
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400	46,402,527	200	16,317,461	100	11,733,000	16.20	1,901,000	-	-	-	-	-	-	16.20	3,998,200	216	20,315,661	43.24	4,063,132	Kecamatan Banyuresmi
1a		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	400	46,402,527	200	16,317,461	100	5,733,000	33.16	1,901,000	12.13	695,400	-	-	-	-	45.29	2,596,400	245	18,913,861	49.06	3,782,772	Kecamatan Banyuresmi
1b		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-	-	100	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0.00	-	Kecamatan Banyuresmi	
1c		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-	-	100	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Kecamatan Banyuresmi	
1d		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			-	-	100	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Kecamatan Banyuresmi	

1e		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			-	-	100	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Kecamatan Banyuresmi		
1f		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaiann Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaiann Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinas Penyusunan Laporan Capaiann Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	-	-	-	100	1,000,000	40.18	401,800	-	-	-	-	-	40.18	401,800	40	401,800	8.04	80,360	Kecamatan Banyuresmi		
1g		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-	100	1,000,000	100.00	1,000,000	-	-	-	-	-	100.00	1,000,000	100	1,000,000	20.00	200,000	Kecamatan Banyuresmi		
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	400	9,028,566,383	191	4,054,519,725	100	2,282,581,455	15.44	352,474,186	25.59	584,048,157	-	-	-	-	41.03	936,522,343	232	4,991,042,068	46.48	998,208,414	Kecamatan Banyuresmi	
2a		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASNJumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	400	8,974,810,292	191	4,033,851,124	100	2,269,368,045	15.14	343,617,546	25.53	579,387,837					40.67	923,005,383	232	4,956,856,507	46.40	991,371,301	Kecamatan Banyuresmi	
2b		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	umlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	400		200	20,668,601	100	13,213,410	67.03	8,856,640	35.27	4,660,320					102.30	13,516,960	302	34,185,561	60.46	6,837,112	Kecamatan Banyuresmi	
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	400	49,671,525	100	11,053,434	100	12,862,500	39.83	5,122,500	-	-	-	-	-	39.83	5,122,500	140	16,175,934	27.97	3,235,187	Kecamatan Banyuresmi		
3a		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	400	49,671,525	100	11,053,434	100	12,862,500	39.83	5,122,500	-	-	-	-	-	39.83	5,122,500	140	16,175,934	27.97	3,235,187	Kecamatan Banyuresmi		
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	400	756,451,120	200	285,599,640	12	205,755,508	19.55	40,221,300	13.74	28,272,100	-	-	-	-	33.29	68,493,400	233	354,093,040	46.65	70,818,608	Kecamatan Banyuresmi	
4a		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	400	30,600,011	200	13,827,408	100	8163225	16.92	1,381,500	25.43	2,076,200	-	-	-	-	42.36	3,457,700	242	17,285,108	48.37	3,457,022	Kecamatan Banyuresmi	
4b		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	400		359,275,295	200	108,281,788	100	95829090	11.03	10,570,200	8.99	8,613,900	-	-	-	-	20.02	19,184,100	220	127,465,888	44.00	25,493,178	Kecamatan Banyuresmi
4c		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	400		29,832,836	200	12,387,848	100	7898310	22.46	1,774,000	-	-	-	-	-	22.46	1,774,000	222	14,161,848	44.40	2,832,370	Kecamatan Banyuresmi	
4d		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	400		87,848,193	200	41,607,654	100	21556363	25.82	5,566,100	23.79	5,128,100	-	-	-	-	49.61	10,694,200	250	52,301,854	49.92	10,460,371	Kecamatan Banyuresmi

4e		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	400	19,408,686	200	9,484,881	100	4840920	25.21	1,220,400	25.21	1,220,400	-	-	-	-	50.42	2,440,800	250	11,925,681	50.08	2,385,136	Kecamatan Banyuresmi
4f		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	400	100,620,000	200	48,960,001	100	25200000	24.93	6,283,500	24.93	6,283,500	-	-	-	-	49.87	12,567,000	250	61,527,001	49.97	12,305,400	Kecamatan Banyuresmi
4g		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400		128,866,100	200	51,050,060	100	33642000	14.27	4,800,000	14.71	4,950,000	-	-	-	-	28.98	9,750,000	229	60,800,060	45.80	12,160,012
4h		Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	8,625,600	0	-	100	8,625,600	100.00	8,625,600	-	-	-	-	-	-	100.00	8,625,600	100	8,625,600	20.00	1,725,120	Kecamatan Banyuresmi
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentse Sarana dan Prasarana Aparatur yang berkondisi Baik	400	3,787,477,027	200	1,934,083,003	100	212,084,801	-	-	25.86	54,842,053	-	-	-	-	25.86	54,842,053	226	1,988,925,056	45.17	397,785,011	Kecamatan Banyuresmi
5a		Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah barang milik daerah	400	236,437,500																0.00	-		
5b		Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan Lainnya	400	1,936,000,000	100	1,872,579,651		-	-			-					-	100	1,872,579,651	20.00	374,515,930	Kecamatan Banyuresmi	
5c		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	400	400,321,868	100	13,853,800	100	78750000	-	-	34.04	26,809,800	-	-	-	-	34.04	26,809,800	134	40,663,600	26.81	8,132,720	Kecamatan Banyuresmi
5d		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			100	47,649,552	100	133334801	-	-	21.02	28,032,253	-	-	-	-	21.02	28,032,253	121	75,681,805	24.20	15,136,361	Kecamatan Banyuresmi
5e		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan lahan	100	1,214,717,659																0.00	-		
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentse Sarana dan Prasarana Aparatur yang berkondisi Baik	400	198,392,517	196	81,557,428	100	51,424,779	18.76	9,649,160	15.25	7,840,532	-	-	-	-	34.01	17,489,692	230	99,047,120	45.93	19,809,424	Kecamatan Banyuresmi
6a		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	400	49,851,840	183	13,993,681	100	12600000	28.39	3,577,560	26.27	3,310,532	-	-	-	-	54.67	6,888,092	237	20,881,773	47.47	4,176,355	Kecamatan Banyuresmi
6b		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	400	31,683,575	200	15,260,002	100	8011500	17.72	1,420,000	-	-	-	-	-	-	17.72	1,420,000	218	16,680,002	43.54	3,336,000	Kecamatan Banyuresmi
6c		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	400	116,857,102	200	52,303,745	100	30813279	15.10	4,651,600	14.70	4,530,000	-	-	-	-	29.80	9,181,600	230	61,485,345	45.96	12,297,069	Kecamatan Banyuresmi

7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentse Sarana dan Prasarana Aparatur yang berondisi Baik	400	344,556,448	200	226,263,938	100	98,110,950	4.65	4,560,000	4.65	4,560,000	-	-	-	-	9.30	43,120,000	209	269,383,938	41.78	53,876,788	Kecamatan Banyuresmi
7a		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	400	86,122,850	199	40,847,305	100	21,777,000	20.94	4,560,000	20.94	4,560,000	-	-	-	-	41.88	9,120,000	241	49,967,305	48.12	9,993,461	Kecamatan Banyuresmi
7b		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	400	95,711,750	200	42,439,502	100	23,835,000	12.59	3,000,000	4.20	1,000,000					16.78	4,000,000	217	46,439,502	43.36	9,287,900	Kecamatan Banyuresmi
7c		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	400	162,721,848	200	142,977,131	100	52,498,950	28.57	15,000,000	28.57	15,000,000	-	-	-	-	57.14	30,000,000	257	172,977,131	51.36	34,595,426	Kecamatan Banyuresmi
II	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	400	1,291,002,737	200	655,499,400	100	307,867,140	14.41	44,370,400	2.76	8,491,000	-	-	-	-	17.17	104,656,400	217	760,155,800	43.43	152,031,160	Kecamatan Banyuresmi
1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	400	494,535,338	200	280,795,100	100	104,994,750	-	-	2.86	3,006,100	-	-	-	-	2.86	3,006,100	203	283,801,200	40.57	56,760,240	Kecamatan Banyuresmi
1a		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	400	494,535,338	200	280,795,100	100	104,994,750	-	-	2.86	3,006,100	-	-	-	-	2.86	3,006,100	203	283,801,200	40.57	56,760,240	Kecamatan Banyuresmi
2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan Paten yang sesuai Standar Pelayanan	400	796,467,400	200	374,704,300	100	202,872,390	21.87	44,370,400	2.70	5,484,900	-	-	-	-	24.57	101,650,300	225	476,354,600	44.91	95,270,920	Kecamatan Banyuresmi
2a		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	400	148,559,356	200	327,580,000	100	49,480,515	6.63	3,280,000	11.08	5,484,900	-	-	-	-	17.71	8,764,900	218	336,344,900	43.54	67,268,980	Kecamatan Banyuresmi
2b		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	400	647,908,044	100	47,124,300	100	153,391,875	26.79	41,090,400	33.77	51,795,000	-	-	-	-	60.55	92,885,400	161	140,009,700	32.11	28,001,940	Kecamatan Banyuresmi
III	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	400	257,721,008	100	32,704,700	100	124,945,955	7.98	9,968,700	2.15	2,684,500	-	-	-	-	10.13	19,853,200	110	52,557,900	22.03	10,511,580	Kecamatan Banyuresmi

1	Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan	400	240,002,808	100	14,986,500	100	74,945,955	-	-	-	-	-	-	-	-	100	14,986,500	20.00	2,997,300	Kecamatan Banyuresmi		
1a		Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan kegiatan RPTK	400	61,321,945	100	14,986,500	100	15,432,900	-	-	-	-	-	-	-	-	100	14,986,500	20.00	2,997,300	Kecamatan Banyuresmi		
1b		Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan	400	178,680,863	-	-	100	59,513,055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Kecamatan Banyuresmi		
2		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	400	17,718,200	100	17,718,200	100	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	17,718,200	20.00	3,543,640	Kecamatan Banyuresmi		
2a		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	jumlah pelaksanaan kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan	400	17,718,200	100	17,718,200	100	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	17,718,200	20.00	3,543,640	Kecamatan Banyuresmi		
3		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan			100	-	100	10,000,000	27.69	2,768,700	26.85	2,684,500	-	-	-	-	54.53	5,453,200	155	5,453,200	30.91	1,090,640	Kecamatan Banyuresmi
3a		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					100	10,000,000	27.69	2,768,700	26.85	2,684,500	-	-	-	-	54.53	5,453,200	55	5,453,200	10.91	1,090,640	Kecamatan Banyuresmi
4		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				-	100	30,000,000	24.00	7,200,000	24.00	7,200,000					48.00	14,400,000	48	14,400,000	9.60	2,880,000	Kecamatan Banyuresmi
4a		Penanganan Covid-19 di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				-	100	30000000	24.00	7,200,000	24.00	7,200,000	-	-	-	-	48.00	14,400,000	48	14,400,000	9.60	2,880,000	Kecamatan Banyuresmi
IV	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	400	455,248,987	200	181,676,500	100	190,560,000	-	-	43.36	82,634,500	-	-	-	-	43.36	109,334,500	243	291,011,000	48.67	58,202,200	Kecamatan Banyuresmi
1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Tranitibum	400	455,248,987	200	181,675,512	100	90,560,000	-	-	72.81	65,934,500	-	-	-	-	72.81	65,934,500	273	247,610,012	54.56	49,522,002	Kecamatan Banyuresmi

1a		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	400	359,221,000	200	181,675,512	100	90510000	-	-	19.47	17,624,400	-	-	-	-	19.47	17,624,400	219	199,299,912	43.89	39,859,982	Kecamatan Banyuresmi
1b		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	400	96,027,987	0	-	100	50000	-	-	96,620	48,310,100	-	-	-	-	96,620	48,310,100	#####	48,310,100	19324.04	9,662,020	Kecamatan Banyuresmi
2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum				-	100	100,000,000	26.70	26,700,000	16.70	16,700,000	-	-	-	-	43.40	43,400,000	43	43,400,000	8.68	8,680,000	Kecamatan Banyuresmi
2a		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	50000200			100	100,000,000	26.70	26,700,000	16.70	16,700,000	-	-	-	-	43.40	43,400,000	43	43,400,000	8.68	8,680,000	Kecamatan Banyuresmi
V	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	400	1,010,350,540	200	418,081,900	100	269,902,605	15.01	40,505,800	15.81	42,675,800					30.82	83,181,600	231	501,263,500	46.16	100,252,700	Kecamatan Banyuresmi
1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	400	1,010,350,540	200	418,081,900	100	269,902,605	15.01	40,505,800	15.81	42,675,800					30.82	83,181,600	231	501,263,500	46.16	100,252,700	Kecamatan Banyuresmi
1a		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400	22,225,125	100	18,081,700	100	7402500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	18,081,700	20.00	3,616,340	Kecamatan Banyuresmi
1b		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	400	157,625,000		-	100	52500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Kecamatan Banyuresmi

1c		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	400	830,500,415	200	400,000,200	100	210000105	19.29	40,505,800	20.32	42,675,800	-	-	-	-	39.61	83,181,600	240	483,181,800	47.92	96,636,360	Kecamatan Banyuresmi
VI	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	400	229,586,487	100	51,464,943	100	45,367,500	39.68	18,000,000	46.05	20,891,100					85.72	38,891,100	186	90,356,043	37.14	18,071,209	Kecamatan Banyuresmi
1		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	400	130,402,532	100	27,567,000		-	-							-		100	27,567,000	19.99	5,513,400	Kecamatan Banyuresmi	
1a		Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	400	130,402,532	100	43,433,040			-	-							-		100	43,433,040	19.99	8,686,608	Kecamatan Banyuresmi
2			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	400	99,183,955	100	23,897,943		-	-							-		100	23,897,943	20.00	4,779,589	Kecamatan Banyuresmi
2a		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	400	52,848,510	100	17,602,200			-	-							-		100	17,602,200	20.00	3,520,440	Kecamatan Banyuresmi
2b		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	400	46,335,445		100	15,432,900			-	-							-		100	15,432,900	20.00	3,086,580
3		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik				-	100	45,367,500	39.68	18,000,000	46.05	20,891,100					85.72	38,891,100	86	38,891,100	17.14	7,778,220	Kecamatan Banyuresmi
3a		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					100	22,725,000	13.20	3,000,000	32.17	7,311,100	-	-	-	-	45.37	10,311,100	45	10,311,100	9.07	2,062,220	Kecamatan Banyuresmi
3b		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					100	20,000,000	-	-	67.90	13,580,000	-	-	-	-	67.90	13,580,000	68		13.58	-	Kecamatan Banyuresmi
3c		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaa Pembangunan Partisipatif					100	15,000,000	100.00	15,000,000	-	-	-	-	-	-	100.00	15,000,000	100	15,000,000	20.00	3,000,000	Kecamatan Banyuresmi
3d		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif					100	7,642,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	Kecamatan Banyuresmi
Rata-rata capaian kinerja (%)																						40.04		
Predikat kinerja																						40.04		

Sumber : Lap. Evaluasi renja, 2022

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023	47
---	----

2.2.3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) & Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Proyek Strategis Nasional (*Stunting*)

Adapun dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023 beserta realisasi capaian SPM serta program yang mendukung pencapaian SPM disajikan pada tabel 2.8

Tabel 2.8
Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian SPM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023



No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
1.1.1	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	46.73	18566	Jiwa
1.1.2	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	36	1563	Jiwa
1.2.1	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	33.62	541	Jiwa
1.2.2	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%	16.38	66	Jiwa
1.3	Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%	38.69	154	Keluarga
1.4.1	Individu miskin mendapat layanan kesehatan	86.21	75	Jiwa
1.4.2	Individu miskin mendapat pendidikan SD	95.19	198	Jiwa
1.4.3	Individu miskin mendapat pendidikan SMP	95.24	100	Jiwa
1.4.4	Individu miskin mendapat pendidikan SMA	80.2	81	Jiwa
1.4.5	Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3/S1/S2)	1.66	17	Jiwa
1.4.6	Keluarga miskin pengguna listrik (PLN/NonPLN)	99.5	396	Keluarga
1.4.7	Keluarga miskin dengan akses sanitasi layak	94.47	376	Keluarga
1.4.8	Keluarga miskin dengan kondisi rumah tidak kumuh subjektif	94.99	379	Keluarga
1.4.9	Keluarga miskin dengan kondisi rumah tidak kumuh objektif	99.19	3196	Keluarga
1.5	Keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100%	100	1	Jiwa

2

DESA TANPA
KELAPARAN



Capaian

35.93

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
2.1	Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%	99.94	2	Jiwa
2.2	Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100%	0	0	Jiwa
2.3	Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan	7.84	12	RT

3

DESA SEHAT
DAN SEJAHTERA



Capaian

38.22

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
3.1	BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk	34.3	11954	Jiwa
3.2	Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0%	19.13	4118	Jiwa
3.3	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100%	0	0	Jiwa
3.4	Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup mencapai 0	N/A	0	Jiwa
3.5	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mencapai 0	N/A	0	Jiwa
3.7	Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0%	99.46	187	Jiwa
3.11	Korban penyalahgunaan NAPZA (narkoba) 100% ditangani panti rehabilitasi sosial	N/A	0	Kasus

4

PENDIDIKAN

DESA BERKUALITAS




Capaian

31.5

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
4.1.1	Akses anak ke SD/MI berakreditasi minimal B mencapai 100%	56.53	5468	Keluarga
4.1.2	Akses anak ke SMP/MTs berakreditasi minimal B mencapai 100%	44.08	4264	Keluarga
4.1.3	Akses anak ke SMA/MA berakreditasi minimal B mencapai 100%	38.97	3770	Keluarga
4.2	Akses anak ke pesantren mencapai 100%	27.14	2625	Keluarga
4.3.1	APK SD/MI mencapai 100%	8.4	328	Jiwa
4.3.2	APK SMP/MTs mencapai 100%	7.95	162	Jiwa
4.3.3	APK SMA/MA mencapai 100%	6.34	134	Jiwa
4.4.1	APM SD/MI laki-laki dan perempuan mencapai 100%	7.61	297	Jiwa
4.4.2	APM SMP/MTs laki-laki dan perempuan mencapai 100%	6.13	125	Jiwa
4.4.3	APM SMA/MA laki-laki dan perempuan mencapai 100%	5.06	107	Jiwa
4.6.1	Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun	100	3660.17	Tahun
4.6.2	Rata-rata lama sekolah penduduk mencapai 12 tahun	100	3660.17	Tahun
4.7	Tersedia Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan	1.31	2	RT

5

KETERLIBATAN PEREMPUAN DESA




Capaian

37

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
5.1	Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30%	0	0	Peraturan
5.2	Terdapat perdes/SK Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.	0	0	Peraturan
5.3	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0%	100	0	Kasus
5.5	Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun	0	0	Tahun
5.7	APK SMA/SMK/MA/ sederajat mencapai 100%	6.34	134	Jiwa
5.8	Persentase jumlah perempuan di Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30%	52.63	3	Jiwa
5.9	Persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes dan berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal 30%	100	3	Jiwa

6

DESA LAYAK AIR BERSIH DAN SANITASI



Capaian

57.32

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
6.1.1	Akses terhadap layanan air minum layak mencapai 100% keluarga	94.28	9120	Keluarga
6.1.2	Akses terhadap sanitasi layak mencapai 100% keluarga	88.91	8600	Keluarga
6.2	Keluarga dan industri yang dilayani air baku mencapai 100%	99.06	9582	Keluarga
6.3	Keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah dan lumpur tinja mencapai 100%	24.34	2354	Keluarga
6.4	Kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa di seluruh RT	73.86	113	RT
6.5	Terdapat perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air	0	0	Peraturan
6.7	Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai	0	0	Peraturan
6.12	Air danau dan sungai tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa	78.12	12	Danau dan Sungai

6
DESA LAYAK
AIR BERSIH DAN
SANITASI


Capaian
57.32

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
6.1.1	Akses terhadap layanan air minum layak mencapai 100% keluarga	94.28	9120	Keluarga
6.1.2	Akses terhadap sanitasi layak mencapai 100% keluarga	88.91	8600	Keluarga
6.2	Keluarga dan industri yang dilayani air baku mencapai 100%	99.06	9582	Keluarga
6.3	Keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah dan lumpur tinja mencapai 100%	24.34	2354	Keluarga
6.4	Kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa di seluruh RT	73.86	113	RT
6.5	Terdapat perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air	0	0	Peraturan
6.7	Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai	0	0	Peraturan
6.12	Air danau dan sungai tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa	78.12	12	Danau dan Sungai

8
PERTUMBUHAN
EKONOMI DESA
MERATA


Capaian
22.91

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
8.1	PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta	12.83	3978691.19	Rupiah
8.2	Pekerja sektor formal minimal 51%	12.17	655	Jiwa
8.3	Terdapat akses permodalan formal, dan UMKM mendapat aksesnya	12.75	39	RT
8.4	Tingkat pengangguran terbuka 0%	74.53	3605	Jiwa
8.6	Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%	2.27	82	Jiwa

9

INFRASTRUKTUR
DAN INOVASI DESA
SESUAI KEBUTUHAN

Capaian

22.81

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
9.1	Jalan kondisi baik mencapai 100%	45.61	7810	km
9.2	Dermaga/tambatan perahu kondisi baik mencapai 100%	N/A	0	Dermaga
9.5	Industri yang mencemari udara mencapai 0%	0	18	RT

10

DESA TANPA
KESENJANGAN

Capaian

33.69

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
10.1	Koefisien Gini desa di bawah 0,200	20.1	1	-
10.3	Indeks kebebasan sipil mencapai skor 100%	100	578	Jiwa
10.4	Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100%	14.67	1552	Jiwa
10.5	Tersedia perdes/SK Kades tentang advokasi pekerja migran	0	0	Peraturan

11

KAWASAN PERMUKIMAN DESA AMAN DAN NYAMAN

Capaian

56.5

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
11.1	Rumah kumuh mencapai 0%	91.04	867	Keluarga
11.2	Pengamanan dilaksanakan di 100% RT	39.87	61	RT
11.3	Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel pengguna moda transportasi umum >50%	100	6103	Keluarga
11.5	Swasta dan organisasi kemasyarakatan cangkrukan untuk pembangunan desa	100	1	Kerjasama
11.7	Tersedia peringatan dini bencana	0	0	RT
11.9	Terdapat pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga mencapai 100%	31.26	3024	Keluarga
11.10	Terdapat taman/lapangan di desa	33.33	51	RT

12

KONSUMSI DAN PRODUKSI DESA SADAR LINGKUNGAN

Capaian

9.48

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
12.1	Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga	0	0	Desa
12.2	Tersedia unit pengolah sampah	18.95	29	RT

13

DESA TANGGAP PERUBAHAN IKLIM

Capaian

0

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
13.2	Penanganan/mitigasi bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap RT	0	0	RT

14

DESA PEDULI LINGKUNGAN LAUT



Capaian

50

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
14.1	Tersedia perdes/SK Kades tentang tata ruang desa dan perlindungan sumber daya laut	0	0	Peraturan
14.3	Luas kawasan konservasi perairan minimal 33% dari luas desa	N/A	0	m2
14.5	Tidak ada ilegal fishing	100	1	Kejadian

15

DESA PEDULI LINGKUNGAN DARAT



Capaian

14.05

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
15.1	Tersedia perdes/SK Kades tentang pelestarian keanekaragaman hayati	0	0	Peraturan
15.2	Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas desa	N/A	0	ha
15.3	Luas lahan hutan rusak dan lahan kritis di hutan mencapai 0%, pemanfaatan kayu dari hutan yang direstorasi	28.1	43	RT
15.5	Peningkatan satwa yang terancam punah >50%	N/A	0	Ekor

15

DESA PEDULI LINGKUNGAN DARAT



Capaian

14.05

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
15.1	Tersedia perdes/SK Kades tentang pelestarian keanekaragaman hayati	0	0	Peraturan
15.2	Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas desa	N/A	0	ha
15.3	Luas lahan hutan rusak dan lahan kritis di hutan mencapai 0%, pemanfaatan kayu dari hutan yang direstorasi	28.1	43	RT
15.5	Peningkatan satwa yang terancam punah >50%	N/A	0	Ekor

17

KEMITRAAN UNTUK PEMBANGUNAN DESA



Capaian

71.3

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
17.1	Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Desa di atas 12% per tahun	6.5	32325400	Rupiah
17.2	Terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional	100	1	Kerjasama
17.3	Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi	100	1	Jaringan internet
17.6	Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa	50	0.5	Data dan petugas statistik
17.7	Tersedia data SDGs setiap tahun	100	1	Data SDGs

18
KELEMBAGAAN DESA
DINAMIS DAN BUDAYA
DESA ADAPTIF


Capaian

56.93

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
18.1	Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama	20.15	5176	Jiwa
18.2	Tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa	100	1	Musdes
18.5	Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun	75	3	Musdes
18.6	Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes	33.33	1	Dokumen
18.7	Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota	100	1	Peta desa
18.9	Budaya yang dilestarikan mencapai 100%, lembaga adat aktif	13.07	20	RT
18.10	Penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya >50%	N/A	0	RT

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar capain SPM belum dapat mencapai target dan harus ditindak lanjuti dengan perhatian penug sehingga dapat meningkat, namun terdapat 3 jenis pelayanan dasar yang cukup mendekati target, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar berikut ini :

CAPAIAN SDGS DESA

Provinsi : JAWA BARAT
Kabupaten : KAB. GARUT
Kecamatan : BANYURESMI
Desa : -



:

Untuk tujuan dan target SDGs yang tidak terkait dengan area SPM tidak diuraikan lebih lanjut dalam dokumen ini, karena tidak ada perubahan target. *Stunting* menjadi salah satu proyek strategis nasional, seiring dengan hal tersebut upaya Kabupaten Garut dalam menurunkan angka prevalensi *stunting* adalah dengan dibentuknya Tim Percepatan Penurunan *Stunting* melalui penerbitan Keputusan Bupati Garut Nomor 440/KEP.189-BAPPEDA/2022, serta diterbitkannya Program TOSS (Temukan, Obati, Sayangi balita *Stunting*) guna mengatasi *stunting* di Kabupaten Garut. Program TOSS ini merupakan program lanjutan setelah BPS (Bulan Penimbangan *Stunting*) yang telah berjalan selama bulan Juni tahun 2022 dalam rangka mengobati balita *stunting* serta mencegah

timbulnya kasus *stunting* baru di Kabupaten Garut. Dengan program ini diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Garut yang sekarang berada pada angka 15,6 % menjadi berada dibawah rata-rata nasional yaitu 14%. Pemkab Garut berhasil menurunkan angka prevalensi *stunting* menjadi 23,6 % pada tahun 2022, yang merupakan penurunan tertinggi kedua di Jawa Barat. Melalui gerakan bersama bulan pencarian *stunting*, pemberian makanan tambahan, pengobatan penyakit penyerta, pemantauan tumbuh kembang, peningkatan pola asuh, peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan serta kolaborasi stakeholder bapak asuh.

Begitu pula kecamatan banyuresmi berusaha untuk senantiasa sinergis dengan berbagai program yang di luncurkan di tingkat kabupaten sehingga mampu mewarnai dan menurunkan angka *stunting* di kabupaten Garut dengan melakukan Langkah-langkah sebagai berikut :

- 1. Melakukan pendataan, verifikasi dan mengkoordinasikan hasil pendataan ke dinas/pihak terkait;
- 2. Melakukan monitoring kelapangan untuk melakukan pengecekan secara langsung Bersama porkopincam dan pihak-pihak terkait
- 3. Mendorong desa dan intansi lainnya untuk dapat berupaya melakukan penanganan yang komperhensif terhadap para penderita stanting di Kecamatan Banyuresmi.

Dibawah ini kami sampaikan rekapitulasi data stanting yang sedang dalam proses penanganan :

Rekapitulasi Data Stanting Kecamatan Banyuresmi

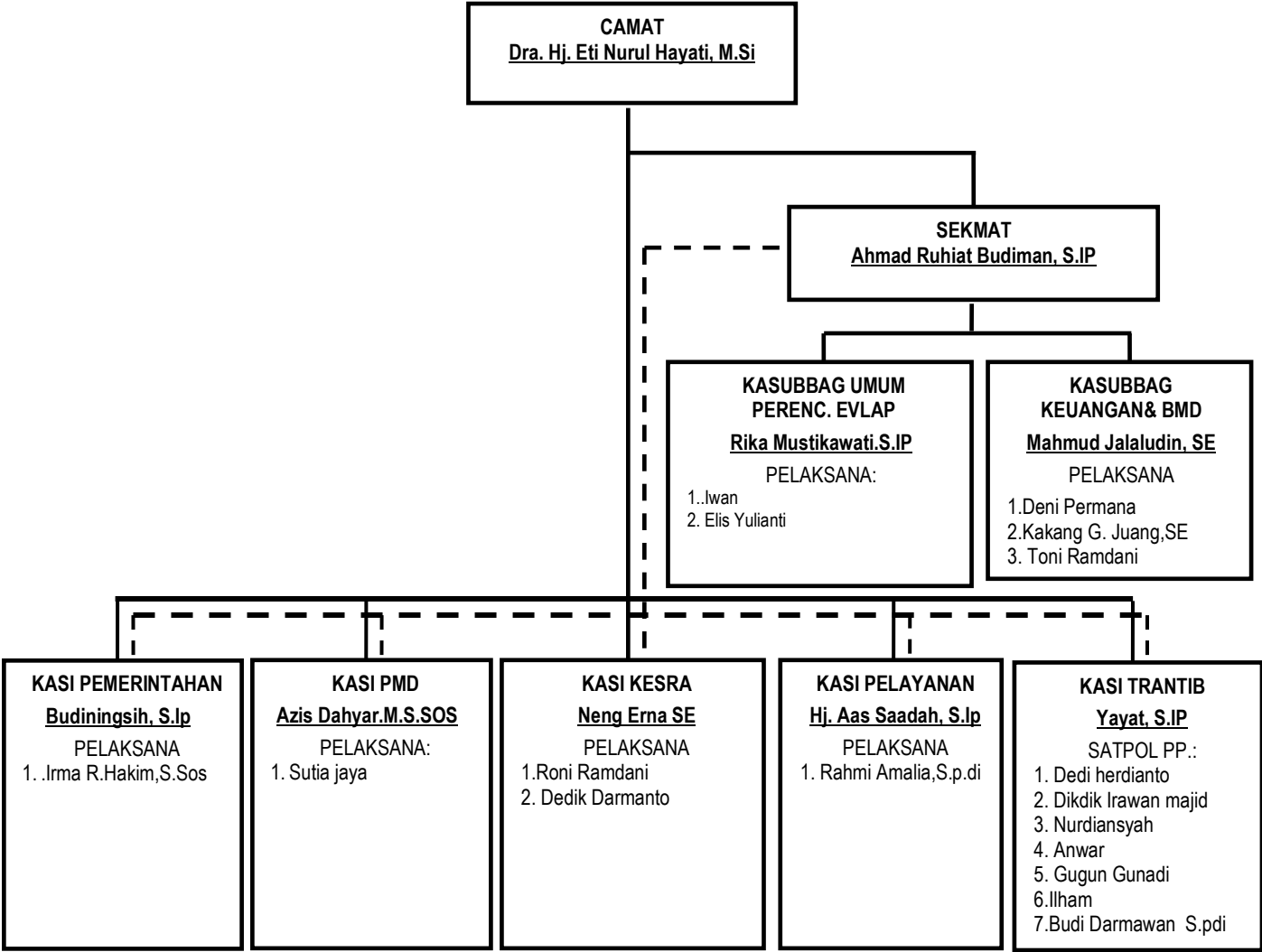
No	Nama Puskesmas	Jumlah Stunting	Ketetapan
1	Sukasenang	96	
2	Bagendit	132	
3	Sukaraja	48	
Jumlah		276	

3.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Kecamatan Banyuresmi sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banyuresmi. Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banyuresmi berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan Berikut :

Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Banyuresmi



Sumber : Perbup nomor 111 tahun 2020

Dengan Rincian tugas pokok dan fungsi struktur organisasi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

a. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

c. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

a. Sub Bagian Keuangan dan BMD

Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

b. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pemerintahan.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

h. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pelayanan.

i. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

Fungsi

a. Camat

1. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelayanan;
2. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelayanan;
3. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;dan

4. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.
- b. Sekretaris Kecamatan
1. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 2. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 3. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 4. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan keuangan, barang milik daerah serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 5. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
 6. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.
- c. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 2. pelaksanaan pelayanan administrasiurusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 3. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
 4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- d. Sub Bagian Keuangan dan BMD
1. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
 2. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;

3. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan.

e. Seksi Pemerintahan

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemerintahan;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemerintahan;
3. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemerintahan;
4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemerintahan.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemberdayaan masyarakat dan Desa;
4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.

g. Seksi Pelayanan

Untuk melakukan tugas tersebut diatas seksi Pelayanan mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;
3. pengumpulan dan pengolahan dataSeksi
4. Pelayanan;pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.

h. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Untuk melaksanakan tugasnya seksi ini mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum
3. pengumpulan dan pengolahan dataseksi ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
5. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja;dan
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

i. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Untuk melaksanakan tugasnya seksi ini mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi kesejahteraan masyarakat;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kesejahteraan masyarakat;
3. pengumpulan dan pengolahan dataseksi kesejahteraan masyarakat;

- 4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2. 9

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SKM			80,5	81	81,5	82	86,72	86,79	81,5	82	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			72,00	74,00	75,50	76,00	72,00	78,99	75,50	76,00	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan			80	85	90	95	85	90	90	95	
4	Nilai SAKIP Kecamatan			CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	

Sumber : Evaluasi Renstra Tahun 2022

3.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan banyuresmi bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- Program RKPD/Renja yang telah ditetapkan hanya sebagian yang dilaksanakan dalam APBD masih terdapat program RKPD/Renja yang tidak terakomodir dalam APBD;
- Pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah;
- Pengendalian internal di masing-masing perangkat daerah belum dilaksanakan secara optimal sehingga mempengaruhi terhadap target capaian organisasi;
- Belum tercapainya beberapa target tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
- Masih rendahnya realisasi kinerja sampai triwulan II Tahun Anggaran 2023 diantaranya masih berlangsungnya proses pengadaan barang dan jasa, kegiatan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih dalam proses persiapan pelaksanaan;
- Keterlambatan penyampaian laporan triwulan capaian kinerja.
- Terjadinya perubahan kebijakan di tingkat kabupaten sehingga mempengaruhi rencana kerja kecamatan seperti adanya efesiensi anggaran yang menyebabkan perubahan anggaran secara parsial, pemberhentian PPKM dan lain-lain.
- Terjadinya Kekurangan pegawai kecamatan sesuai dengan analisis jabatan dan analisis bebankerja yang ada.

Sedangkan Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja hasil evaluasi Tahun Renja 2023, sampai dengan triwulan II, antara lain :

- Tersedianya dokumen perencanaan dengan indikator kenerja yang terukur;

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023</i>	69

- Adanya dukungan pendanaan yang bersumber dari APBN, bantuan keuangan provinsi jawa barat sehingga mendorong pencapaian target kinerja perangkat daerah;
- Tingginya komitmen organisasi Pemerintah Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut untuk meningkatkan target kinerja;

Adapun upaya tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Renja pada tahun berikutnya diantaranya:

- Perlu dilakukannya penyesuaian/reviu rencana anggaran dan target kinerja Renja SKPD yang disesuaikan dengan kondisi riil APBD;
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana secara berjenjang;
- Verifikasi dokumen rencana untuk mewujudkan keselarasan/kesesuaian antar dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD) yang kemudian menjadi pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan dalam APBD;
- Mengimplementasikan dokumen perencanaan daerah dalam kegiatan APBD, agar dapat mengevaluasi secara objektif dan mengendalikan dokumen perencanaan sehingga target kinerja bisa dicapai dengan baik;
- Perlu segeranya dikembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses evaluasi pelaksanaan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mengingat semakin kompleksnya data dan informasi yang perlu diolah.

3.5. Review terhadap Rancangan Perubahan Renja

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja Kecamatan Banyuresmi disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banyuresmi serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yang

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023</i>	70

merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam rangka *review* terhadap Rancangan Perubahan RKPD maka dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja.

Proses review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan pada perubahan Renja dengan arahan Rancangan Perubahan RKPD. Proses perbandingan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja kecamatan Banyuresmi Tahun 2023 menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

- 1. Jumlah program antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 6 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
 - d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
 - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Jumlah kegiatan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 15 kegiatan, yang terdiri dari 40 sub kegiatan;

- 2. Kebutuhan dana/pagu Indikatif yang tercantum pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.205.118.092 telah sesuai dengan kebutuhan dana/pagu indikatif hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 adalah sebesar Rp.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023	71

2.953.157.095 Secara kronologis, pagu indikatif Renja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023 sebelum perubahan mencapai sebesar Rp. 3.205.118.092 dan mengalami penyesuaian sebesar Rp. 251.960.997 pada APBD Tahun 2023 menjadi Rp. 2.953.157.095, dan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 mencapai sebesar Rp. 2.953.157.095 atau berkurang Rp. 251.960.997 dari anggaran pada APBD Tahun 2023.

3. Sesuai Hasil Analisis Kebutuhan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan indikator kinerja sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023	72

Tabel 2.10
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Banyuresmi

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	2,405,648,392	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	2,235,963,695	Terdapat perubahan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Nilai/Predikat SAKIP	1 Laporan	11,733,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Nilai/Predikat SAKIP	1 Laporan	11,733,000	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	5,733,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	5,733,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %	1,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 %	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 %	1,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 %	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 %	1,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 %	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 %	1,000,000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	1,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Nilai/Predikat SAKIP	1 Laporan	2,068,397,347	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Nilai/Predikat SAKIP	1 Laporan	1,912,062,780	Terdapat perubahan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	2,037,873,947	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	1,885,319,380	Terdapat perubahan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %	30,523,400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %	26,743,400	Terdapat perubahan

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Nilai/Predikat SAKIP	1 Laporan	5,122,500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Nilai/Predikat SAKIP	1 Laporan	5,122,500	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 %	5,122,500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 %	5,122,500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Nilai/Predikat SAKIP	1 Laporan	142,987,200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Nilai/Predikat SAKIP	1 Laporan	129,639,600	Terdapat perubahan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah paket komponen listrik	100 %	8,162,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah paket komponen listrik	100 %	8,162,500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	36,200,200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	36,200,200	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 %	5,494,900	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 %	5,494,900	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	21,556,200	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	21,556,200	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Dokumen	100 %	4,813,800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Dokumen	100 %	4,813,800	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 %	25,134,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 %	25,134,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Laporan	100 %	33,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Laporan	100 %	19,650,000	Terdapat perubahan
	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	8,625,600	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	8,625,600	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Nilai/Predikat SAKIP	1 Laporan	57,362,700	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Nilai/Predikat SAKIP	1 Laporan	79,464,700	Terdapat perubahan
	Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 %	28,745,200	Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 %	28,745,200	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 %	28,617,500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 %	28,617,500	

	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah unit Gedung	100 %	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah unit Gedung	100 %	22,102,000	Terdapat perubahan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Nilai/Predikat SAKIP	1 Laporan	38,203,445	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Nilai/Predikat SAKIP	1 Laporan	40,921,115	Terdapat perubahan
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	12,599,745	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	15,317,415	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	7,910,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	7,910,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	17,693,700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	17,693,700	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Nilai/Predikat SAKIP	1 Laporan	81,842,200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Nilai/Predikat SAKIP	1 Laporan	57,020,000	Terdapat perubahan

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023</i>	78

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 %	19,740,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 %	17,020,000	Terdapat perubahan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 %	10,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 %	10,000,000	
	Pemeeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	52,102,200	Pemeeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	30,000,000	Terdapat perubahan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	1 Dokumen	289,650,800	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	1 Dokumen	272,435,800	Terdapat perubahan

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Laporan	87,577,800	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Laporan	80,014,800	Terdapat perubahan
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	87,577,800	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	80,014,800	Terdapat perubahan
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Laporan	202,073,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Laporan	192,421,000	Terdapat perubahan
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	100 %	27,000,000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	100 %	17,348,000	Terdapat perubahan
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	175,073,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	175,073,000	

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023	80

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	1 Dokume n	40,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab. Garut, Banyuresm i, Bagendit	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	1 Dokume n	40,000,000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	1 Laporan	10,000,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Garut, Banyuresm i, Bagendit	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	1 Laporan	10,000,000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Laporan Kegiatan Rutin PKK	100 %	10,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi , Bagendit	Jumlah Laporan Kegiatan Rutin PKK	100 %	10,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan		30,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kab. Garut, Banyuresm i, Bagendit	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan		30,000,000	
	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100 %	30,000,000	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Garut, Banyuresmi , Bagendit	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100 %	30.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	1 Dokume n	177,818,700	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Garut, Banyuresm i, Bagendit	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	1 Dokume n	167,967,300	Terdapat perubaha n

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	1 Laporan	120,700,100	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	1 Laporan	116,234,500	Terdapat perubahan
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 %	70,700,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 %	67,924,400	Terdapat perubahan
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100 %	50,000,100	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100 %	48,310,100	Terdapat perubahan
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	1 Laporan	57,118,600	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	1 Laporan	51,732,800	Terdapat perubahan
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	100 %	57,118,600	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	100 %	51,732,800	Terdapat perubahan

			Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	1 Dokumen	215,000,200	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	1 Dokumen	177,842,800	Terdapat perubahan
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	1 Laporan	215,000,200	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	1 Laporan	177,842,800	Terdapat perubahan
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 %	15,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	100 %	11,142,600	Terdapat perubahan

	Kesatuan Republik Indonesia							Kesatuan Republik Indonesia			
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 %	200,000,200	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 %	166,700,200	Terdapat perubahan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Persentase Desa Berkinerja Baik	1 Dokumen	77,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Persentase Desa Berkinerja Baik	1 Dokumen	58,947,500	Terdapat perubahan
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	1 Laporan	77,000,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	1 Laporan	58,947,500	Terdapat perubahan
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100 %	27,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100 %	22,725,000	Terdapat perubahan
	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100 %	20,000,000	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100 %	13,580,000	

	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100 %	15,000,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100 %	15,000,000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	100 %	15,000,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	100 %	7,642,500	Terdapat perubahan
	JUMLAH				3 205 118.092	JUMLAH				2.953.157.095	

Tabel 2. 11

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana /
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Targe t	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN														3,205,118,092	2,953,157,095		7,083,035,788
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														2,405,648,392	2,235,963,695		5,693,774,113
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														11,733,000	11,733,000		17,319,997
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai/Predik at SAKIP	Kab. Garut, Banyuresm i, Bagendit	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokume n	58 CC	58 CC	5,733,000	5,733,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	12,319,997
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai/Predik at SAKIP	Kab. Garut, Banyuresm i, Bagendit	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokume n	58 CC	58 CC	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1,000,000
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai/Predik at SAKIP	Kab. Garut, Banyuresm i, Bagendit	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokume n	58 CC	58 CC	1,000,000	1,000,000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1,000,000

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023	86

7	1	1	2.0 ₁	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Nilai/Predik at SAKIP	Kab. Garut, Banyuresm i, Bagendit	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokume n	58 CC	58 CC	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1,000,000
7	1	1	2.0 ₁	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Nilai/Predik at SAKIP	Kab. Garut, Banyuresm i, Bagendit	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokume n	58 CC	58 CC	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	0
7	1	1	2.0 ₁	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai/Predik at SAKIP	Kab. Garut, Banyuresm i, Bagendit	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	58 CC	58 CC	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1,000,000
7	1	1	2.0 ₁	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai/Predik at SAKIP	Kab. Garut, Banyuresm i, Bagendit	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	58 CC	58 CC	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1,000,000
7	1	1	2.0 ₂		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,068,397,34 ₇	1,912,062,78 ₀				2,396,710,52 ₈	
7	1	1	2.0 ₂	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	Kab. Garut, Banyuresm i, Bagendit	100 %	100 %	18 Orang/bul an	1 Tahun	58 CC	58 CC	2,037,873,94 ₇	1,885,319,38 ₀	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2,382,836,44 ₇
7	1	1	2.0 ₂	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP	Kab. Garut, Banyuresm i, Bagendit	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	58 CC	58 CC	30,523,400	26,743,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	13,874,081
7	1	1	2.0 ₅		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											5,122,500	5,122,500				66,005,625	

7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Nilai SAKIP	Kab. Garut, Banyuressm i, Bagendit	100 %	100 %	25 Paket	25 Paket	58 CC	58 CC	5,122,500	5,122,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah di tingkat Kecamatan	100 %	13,505,625
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah di tingkat Kecamatan	jumlah pegawai	Nilai SAKIP		100 %	100 %	5 Orang	5 Orang	58 CC	58 CC	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah di tingkat Kecamatan	100 %	52,500,000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											142,987,200	129,639,600				209,036,404	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah paket komponen listrik	Nilai SAKIP	Kab. Garut, Banyuressm i, Bagendit	100 %	100 %	1 paket	1 paket	58 CC	58 CC	8,162,500	8,162,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	8,571,386
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai SAKIP	Kab. Garut, Banyuressm i, Bagendit	100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	58 CC	58 CC	36,200,200	36,200,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	100,620,545
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Nilai SAKIP	Kab. Garut, Banyuressm i, Bagendit	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	58 CC	58 CC	5,494,900	5,494,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	8,293,226
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai SAKIP	Kab. Garut, Banyuressm i, Bagendit	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	58 CC	58 CC	21,556,200	21,558,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	23,684,181
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen	Nilai SAKIP	Kab. Garut, Banyuressm i, Bagendit	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	58 CC	58 CC	4,813,800	4,813,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5,082,966
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP	Kab. Garut, Banyuressm i, Bagendit	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	58 CC	58 CC	25,134,000	25,134,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	26,460,000

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuoresmi Tahun 2023	88

							Kecamatan												Kecamatan		
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan	Nilai SAKIP	Kab. Garut, Banyuoresm i, Bagendit	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	58 CC	58 CC	33,000,000	19,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	35,324,100
7	1	1	2.0 6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP	Kab. Garut, Banyuoresm i, Bagendit	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokume n	58 CC	58 CC	8,625,600	8,625,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1,000,000
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											57,362,700	79,464,700				2,427,689,041
7	1	1	2.0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kendaraan	Nilai SAKIP		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	58 CC	58 CC	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	82,687,500
7	1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Nilai SAKIP	Kab. Garut, Banyuoresm i, Bagendit	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	58 CC	58 CC	28,745,200	28,745,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	140,001,541
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Nilai SAKIP	Kab. Garut, Banyuoresm i, Bagendit	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	58 CC	58 CC	28,617,500	28,617,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	105,000,000
7	1	1	2.0 7	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit Gedung	Nilai SAKIP		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	58 CC	58 CC	0	22,102,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	525,000,000
7	1	1	2.0 7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit sarpras	Nilai SAKIP		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	58 CC	58 CC	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	525,000,000

7	1	1	2.07	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai SAKIP	Kab. Garut, Banyuoresmi, Bagendit	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	58 CC	58 CC	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1,050,000,000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											38,203,445	40,921,115				53,996,020	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai SAKIP	Kab. Garut, Banyuoresmi, Bagendit	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	58 CC	58 CC	12,599,745	15,317,415	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	13,230,000
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai SAKIP	Kab. Garut, Banyuoresmi, Bagendit	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	58 CC	58 CC	7,910,000	7,910,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	8,412,075
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai SAKIP	Kab. Garut, Banyuoresmi, Bagendit	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	58 CC	58 CC	17,693,700	17,693,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	32,353,945
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											81,842,200	57,020,000				523,016,498	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai SAKIP	Kab. Garut, Banyuoresmi, Bagendit	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	58 CC	58 CC	19,740,000	17,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	22,865,850
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nilai SAKIP	Kab. Garut, Banyuoresmi, Bagendit	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	58 CC	58 CC	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	25,026,750
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit mebel	Nilai SAKIP		100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	58 CC	58 CC	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	105,000,000

7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai SAKIP	Kab. Garut, Banyuwresmi, Bagendit	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	58 CC	58 CC	52,102,200	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	55,123,898
7	1	1	2.0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit Sarpras	Nilai SAKIP		100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	58 CC	58 CC	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	210,000,000
7	1	1	2.0 9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	jumlah unit sarpras	Nilai SAKIP		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	58 CC	58 CC	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	105,000,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											289,650,800	272,435,800				428,260,498	
7	1	2	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											87,577,800	80,014,800				215,244,488	
7	1	2	2.0 1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Banyuwresmi, Bagendit	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	82 Point	82 Point	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	105,000,000
7	1	2	2.0 1	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Banyuwresmi, Bagendit	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	82 Point	82 Point	87,577,800	80,014,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	110,244,488
7	1	2	2.0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan											202,073,000	192,421,000				213,016,010	
7	1	2	2.0 2	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Banyuwresmi, Bagendit	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	81.5 (B)	81.5 (B)	27,000,000	17,348,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	51,954,541

7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan an Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Banyuressm i, Bagendit	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	81.5 (B)	81.5 (B)	175,073,000	175,073,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	161,061,469
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											40,000,000	40,000,000					283,693,253
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											10,000,000	10,000,000					78,693,253
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa /Keluraha n yang dapat diberdayakan	jumlah lembaga	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembanguna n		100 %	100 %	5 Lembaga	5 Lembaga	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa /Keluraha n yang dapat diberdayakan	100 %	16,204,545
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa /Keluraha n yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan Kegiatan Rutin PKK	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembanguna n	Kab. Garut, Banyuressm i, Bagendit	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Masyarakat Desa /Keluraha n yang dapat diberdayakan	100 %	62,488,708
7	1	3	2.0 3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											0	0					115,000,000
7	1	3	2.0 3	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat Desa /Keluraha n yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan		Kab. Garut, Banyuressm i, Bagendit	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa /Keluraha n yang dapat diberdayakan	100 %	10,000,000
7	1	3	2.0 3	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase Masyarakat Desa /Keluraha n yang dapat diberdayakan	jumlah laporan pengembangan UKM		Kab. Garut, Banyuressm i, Bagendit	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa /Keluraha n yang dapat diberdayakan	100 %	105,000,000
7	1	3	2.0 5		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)											30,000,000	30,000,000					50,000,000
7	1	3	2.0 5	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembanguna n	Kab. Garut, Banyuressm i, Bagendit	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	30,000,000	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	40,000,000
7	1	3	2.0 5	3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembanguna n	Kab. Garut, Banyuressm i, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	10,000,000
7	1	3	2.0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan											0	0					40,000,000

7	1	3	2.06	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Garut, Banyuoresmi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 Keluarga	15 Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	5,000,000
						Prosentase Penyelenggara an Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan				0 %	0 %									Prosentase Penyelenggara n Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	0 %	
7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Garut, Banyuoresmi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 Keluarga	15 Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	5,000,000
						Prosentase Penyelenggara an Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan				0 %	0 %									Prosentase Penyelenggara n Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	0 %	
7	1	3	2.06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Garut, Banyuoresmi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 Keluarga	15 Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	5,000,000
						Prosentase Penyelenggara an Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan				0 %	0 %									Prosentase Penyelenggara n Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	0 %	

7	1	3	2.06	5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Garut, Banyuwesmi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 Keluarga	15 Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	5,000,000
						Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan				0 %	0 %									Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	0 %	
7	1	3	2.06	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Garut, Banyuwesmi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 Keluarga	15 Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	5,000,000
						Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan				0 %	0 %									Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	0 %	
7	1	3	2.06	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Garut, Banyuwesmi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 Keluarga	15 Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	5,000,000
						Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan				0 %	0 %									Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	0 %	

7	1	3	2.06	8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Garut, Banyuwresmi, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 Keluarga	15 Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	5,000,000
						Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan				0 %	0 %									Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	0 %	
7	1	3	2.06	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		100 %	100 %	15 Keluarga	15 Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	5,000,000
						Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan				0 %	0 %									Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	0 %	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											177,818,700	167,967,300				233,618,642	
7	1	4	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											120,700,100	116,234,500				128,618,642	
7	1	4	7.03	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Banyuwresmi, Bagendit	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	7.6 Point	7.6 Point	70,700,000	67,924,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	95,035,500
																				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7	1	4	7.03	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Banyuwresmi, Bagendit	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	7.6 Point	7.6 Point	50,000,100	48,310,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	33,583,142
7	1	4	7.04		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah											57,118,600	51,732,800				105,000,000	

7	1	4	7.04	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresm i, Bagendit	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	7.6 Point	7.6 Point	57,118,600	51,732,800	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	105,000,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											215,000,200	177,842,800	283,397,735				
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah											215,000,200	177,842,800	283,397,735				
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal lka serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal lka serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresm i, Bagendit	100 %	100 %	300 Orang	300 Orang	7.6 Point	7.6 Point	15,000,000	11,142,600	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	7,772,625
7	1	5	2.01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah peserta pembinaan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan		100 %	100 %	30 Orang	30 Orang	7.6 Point	7.6 Point	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	55,125,000

7	1	5	2.0 1	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7.6 Point	7.6 Point	200,000,200	166,700,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	220,500,110
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											77,000,000	58,947,500				160,291,547	
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											77,000,000	58,947,500				160,291,547	
7	1	6	2.0 1	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7.6 Point	7.6 Point	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	20,000,000
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7.6 Point	7.6 Point	27,000,000	22,725,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	45,604,692
7	1	6	2.0 1	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7.6 Point	7.6 Point	20,000,000	13,580,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	20,000,000
7	1	6	2.0 1	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7.6 Point	7.6 Point	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	18,482,310
7	1	6	2.0 1	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7.6 Point	7.6 Point	15,000,000	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	16,204,545
7	1	6	2.0 1	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Banyuresmi, Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7.6 Point	7.6 Point	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	20,000,000

7	1	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Banyuwesmi, Bagendit	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	7.6 Point	7.6 Point	15,000,000	7,642,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	20,000,000
TOTAL																3,205,118,092	2,953,157,095				7,083,035,788	

Sumber : Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Kecamatan Banyuresmi tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efesien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023</i>	99

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Perubahan Renstra Kecamatan Banyuresmi yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera "Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;
- 2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
- 3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
- 2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
- 3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemandapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023	100

- 4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
 - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
 - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
 - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
- 2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
- 3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
 - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir

4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta penguatan demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

- PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong

Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;

- PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
- PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

1. Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam urusan kewilayahan yang dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait adalah Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan, serta sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan, Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan, Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan urusan Kecamatan/SKPD adalah PPD 7 Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Dengan menitikberatkan pada indikator kinerja utama pemerintah daerah yang telah ditetapkan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Banyuresmi mempunyai tujuan :

- 1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah
- 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Adapun Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2024 adalah :

- 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan
- 3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- 4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
- 5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga jika tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2024 adalah :

- 1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- 2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
- 3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
- 4. Nilai SAKIP Kecamatan

Adapun tujuan, sasaran dan indikator Kecamatan banyuresmi dapat dilihat pada tabel berikut :

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023</i>	104

Tabel 3. 1
Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja Kecamatan Banyuresmi
Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	82
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	7,6
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	95%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	CC

Sumber : Rencana Strategis Kecamatan Banyuresmi Tahun 2019-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Substansi pada Perubahan Renja Tahun 2023 diantaranya yaitu adanya penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan kegiatan/subkegiatan; perubahan pagu program, kegiatan atau subkegiatan, serta perubahan indikator dan target indikator program, kegiatan atau subkegiatan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran Renstra tahun 2019-2024 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja
Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	KECAMATAN BANYURESMI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,235,963,695
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11,733,000

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023	106

				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,733,000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,000,000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,000,000
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,000,000
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1,000,000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,000,000
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,000,000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,912,062,780
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1,885,319,380
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26,743,400
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		5,122,500
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5,122,500
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		129,639,600
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,162,500
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36,200,200
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,494,900
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,558,600
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,813,800
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	25,134,000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19,650,000
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8,625,600
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		79,464,700
				Pengadaan Mebel	28,745,200

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023	107

				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28,617,500
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22,102,000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		40,921,115
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15,317,415
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7,910,000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17,693,700
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		57,020,000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17,020,000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10,000,000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30,000,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			272,435,800
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		80,014,800
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80,014,800
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		192,421,000
				Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	17,348,000
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			40,000,000

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuwesmi Tahun 2023	108

			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		10,000,000
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10,000,000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		30,000,000
				Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	30,000,000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			167,967,300
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		116,234,500
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	67,924,400
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	48,310,100
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah		51,732,800
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	51,732,800
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			177,842,800
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		177,842,800

				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	11,142,600
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	166,700,200
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			58,947,500
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		58,947,500
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	22,725,000
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15,000,000
				Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7,642,500
		6	15	41	2,953,157,095

Sumber : Hasil Pengolahan data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dikelola dalam SIPD.

Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Jumlah bidang urusan pemerintahan sebanyak 1 bidang urusan yaitu bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan.
- Jumlah program sebanyak 6 program, yaitu :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023	110

- c. Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- d. Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum;
- f. Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.

3. Jumlah kegiatan sebanyak 15 kegiatan;

4. Jumlah sub kegiatan sebanyak 41 sub kegiatan;

Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 6,355,570,923 ,- 3,205,118,092, dengan kronologis dari pagu indikatif pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp. 6,355,570,923,- mengalami penyesuaian sebesar Rp.3.150.458.831,- pada APBD Murni Tahun 2023 menjadi Rp. 3,205,118,092,-, dan pada Perubahan Renja Tahun 2023 kembali mengalami penyesuaian sebesar Rp. 251.960.997 menjadi sebesar Rp. 2,953,157,095,-, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah tersaji pada table berikut :

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023</i>	111

Tabel 3. 3

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Banyuresmi

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Banyuresmi

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7						UNSUR KEWILAYAHAN										3,205,118,092	2,953,157,095					7,053,035,788	
7	1					KECAMATAN										3,205,118,092	2,953,157,095					7,053,035,788	
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	CC	CC	2,405,648,392	2,235,963,695	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	5,693,774,113
7	1	1	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	CC	CC	11,733,000	11,733,000	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat	100%	17,319,997

							Perangkat Daerah													Kecamatan		
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	CC	CC	5,733,000	5,733,000	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	12,319,997
7	1	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	CC	CC	1,000,000	1,000,000	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	1,000,000
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	CC	CC	1,000,000	1,000,000	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	1,000,000
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	CC	CC	1,000,000	1,000,000	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	1,000,000
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	CC	CC	1,000,000	1,000,000	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	100%	0

						Kecamatan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD													Tingkat Kecamatan		
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	CC	CC	1,000,000	1,000,000	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	1,000,000
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	CC	CC	1,000,000	1,000,000	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	1,000,000
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	CC	CC	2,068,397,347	1,912,062,780	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	2,382,836,447
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	18 Orang/bulan	1 Tahun	CC	CC	2,037,873,947	1,885,319,380	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	

7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	CC	CC	30,523,400	26,743,400	DAU	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	2,382,836,447
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	CC	CC	5,122,500	5,122,500	DAU	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	66,005,625
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	25 Paket	25 Paket	CC	CC	5,122,500	5,122,500	DAU	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	100%	13,505,625
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	jumlah pegawai	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	5 Orang	5 Orang	CC	CC	0	0	DAU	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	52,500,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	CC	CC	142,987,200	129,639,600	DAU	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	209,036,404

7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah paket komponen listrik	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 paket	1 paket	CC	CC	8,162,500	8,162,500	DAU	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	8,571,386
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	4 Paket	4 Paket	CC	CC	36,200,200	36,200,200	DAU	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	100,620,545
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Paket	1 Paket	CC	CC	5,494,900	5,494,900	DAU	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	8,293,226
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Paket	1 Paket	CC	CC	21,556,200	21,558,600	DAU	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	23,684,181
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	CC	CC	4,813,800	4,813,800	DAU	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	5,082,966

7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	CC	CC	25,134,000	25,134,000	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	26,460,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	CC	CC	33,000,000	19,650,000	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	35,324,100
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	CC	CC	8,625,600	8,625,600	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	1,000,00
]	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	CC	CC	57,362,700	79,464,700	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	2,427,689,041
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah unit kendaraan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Unit	1 Unit	CC	CC	0	0	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	82,687,500

7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	2 Paket	2 Paket	CC	CC	28,745,200	28,745,200	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	140,001,541
7	01	01	2.07	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	4 Unit	4 Unit	CC	CC	28,617,500	28,617,500	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	105,000,000
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah unit Gedung	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Unit	1 Unit	CC	CC	0	22,102,000	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	525,000,000
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah unit sarpras	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Unit	1 Unit	CC	CC	0	0	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	525,000,000
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Unit	1 Unit	CC	CC	0	0	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	1,050,000,000

7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	CC	CC	38,203,445	40,921,115	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	53,996,020
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	CC	CC	12,599,745	15,317,415	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	13,230,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	CC	CC	7,910,000	7,910,000	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	8,412,075
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	CC	CC	17,693,700	17,693,700	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	32,353,945
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	CC	CC	81,842,200	57,020,000	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	523,016,498

7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	5 Unit	5 Unit	CC	CC	19,740,000	17,020,000	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	22,865,850
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Unit	1 Unit	CC	CC	10,000,000	10,000,000	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	25,026,750
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah Unit mebel	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	5 Unit	5 Unit	CC	CC	0	0	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	105,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Unit	1 Unit	CC	CC	52,102,200	30,000,000	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	55,123,898
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	Jumlah unit Sarpras	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	2 Unit	2 Unit	CC	CC	0	0	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	210,000,000

7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan	jumlah unit sarpras	Nilai/Pre dikat SAKIP	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Unit	1 Unit	CC	CC	0	0	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	105,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Program Penyeleng garaan Pemerinta han Dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	82 Point	82 Point	289,650,800	272,435,800	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	428,260,498
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyeleng garaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	82 Point	82 Point	87,577,800	80,014,800	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	215,244,488
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaa n dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	82 Point	82 Point	0	0	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	105,000,000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	82 Point	82 Point	87,577,800	80,014,800	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	110,244,488

							Kecamatan																
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanak an oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah laporan Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han yang tidak Dilaksanak an oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamat an Banyures mi	100%	100%	1 Lapora n	1 Lapo ran	82 Point	82 Point	202,073,000	192,421,000	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	213,016,010	
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaa n Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarak at	Kecamata n Banyures mi	100%	100%	1 Doku men	1 Dok umen	82 Point	82 Point	27,000,000	17,348,000	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	51,954,541	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkata n Efektifitas Pelaksanaa n Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamata n Banyures mi	100%	100%	1 Lapora n	1 Lap oran	82 Point	82 Point	175,073,000	175,073,000	DAU		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	161,061,469	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan n yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Program Pemberday aan Masyaraka t Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipas i Masyarakat at Dalam Pembang unan	Kecamat an Banyures mi	100%	100%	1 Dokum en	1 Doku men	90 %	90 %	40,000,000	40,000,000	DAU		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayaka n	100%	283,693,253	

7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Kecamatan Banyuwesmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	90 %	90 %	10,000,000	10,000,000	DAU		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	78,693,253
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	jumlah lembaga	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Kecamatan Banyuwesmi	100%	100%	5 Lembaga	5 Lembaga	90 %	90 %	0	0	DAU		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	16,204,545
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan Kegiatan Rutin PKK	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Kecamatan Banyuwesmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	90 %	90 %	10,000,000	10,000,000	DAU		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	62,488,708
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Kecamatan Banyuwesmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	90 %	90 %	0	0	DAU		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Kecamatan Banyuwesmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	90 %	90 %	0	0	DAU		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	10,000,000
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	jumlah laporan pengembangan UKM	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Kecamatan Banyuwesmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	90 %	90 %	0	0	DAU		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	105,000,000

7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Kecamatan Banyuwesmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	90 %	90 %	30,000,000	30,000,000	DAU		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Kecamatan Banyuwesmi	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	30,000,000	30,000,000	DAU		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	40,000,000
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Kecamatan Banyuwesmi	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	0	0	DAU		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	10,000,000
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Kecamatan Banyuwesmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	90 %	90 %	0	0	DAU		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	40,000,000
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Kecamatan Banyuwesmi	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	0	0	DAU		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	5,000,000

					Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara															
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Kecamatan Banyuwesmi	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	0	0	DAU		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	5,000,000
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Kecamatan Banyuwesmi	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	0	0	DAU		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	5,000,000
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Kecamatan Banyuwesmi	100%	100%			90 %	90 %	0	0	DAU			100%	

							tentang Kepemilikan Rumah															
7	0 1	0 3	2.06	0 6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Kecamatan Banyuwangi	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	0	0	DAU		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	5,000,000
7	0 1	0 3	2.06	0 7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Kecamatan Banyuwangi	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	0	0	DAU		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	5,000,000
7	0 1	0 3	2.06	0 8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangu	Kecamatan Banyuwangi	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	0	0	DAU		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	5,000,000

					Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		an Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	nan											yang dapat diberdayakan		
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	0	0	DAU	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	5,000,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Dokumen Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	7.6 Point	7.6 Point	177,818,700	167,967,300	DAU	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	233,618,642
7	01	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	7.6 Point	7.6 Point	120,700,100	116,234,500	DAU	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	128,618,642
7	01	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	7.6 Point	7.6 Point	70,700,000	67,924,400	DAU	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	

					Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
7	01	04	7.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	7.6 Point	7.6 Point	50,000,100	48,310,100	DAU		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	
7	01	04	7.04		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	7.6 Point	7.6 Point	57,118,600	51.732.800	DAU		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	105,000,000
7	01	04	7.04	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	7.6 Point	7.6 Point	57,118,600	51.732.800	DAU		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	105,000,000

							Republik Indonesia															
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Program Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum	Nilai Sinergita s Kinerja Kecamatan	Kecamat an Banyures mi	100%	100%	1 Dokumen	1 Doku men	7.6 Point	7.6 Point	215,000,200	177,842,800	DAU		Persentase Penyelengga raan Urusan Pemerintaha n Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	283,397,735
7	01	05	2.01		Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai Sinergita s Kinerja Kecamatan	Kecamat an Banyures mi	100%	100%	1 Lapora n	1 Lapo ran	7.6 Point	7.6 Point	215,000,200	177,842,800	DAU		Persentase Penyelengga raan Urusan Pemerintaha n Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	283,397,735
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaa n dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantap kan Pengamala n Pancasila, Pelaksanaa n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertaha nan dan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kecamata n Banyures mi	100%	100%	300 Orang	300 Oran g	7.6 Point	7.6 Point	15,000,000	11,142,600	DAU		Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	7,772,625

							Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah peserta pembinaan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	30 Orang	30 Orang	7.6 Point	7.6 Point	0	0	DAU		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	55,125,000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	7.6 Point	7.6 Point	200,000,200	166,700,200	DAU		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	220,500,110
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	7.6 Point	7.6 Point	77,000,000	58,947,500	DAU		Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	160,291,547
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	7.6 Point	7.6 Point	77,000,000	58,947,500	DAU		Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	160,291,547
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kecamatan Banyuresmi	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	7.6 Point	7.6 Point	0	0	DAU		Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	20,000,000

							Kepala Desa															
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kecamatan Banyuwesmi	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	7.6 Point	7.6 Point	27,000,000	22,725,000	DAU		Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	45,604,692
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kecamatan Banyuwesmi	100%	100%			7.6 Point	7.6 Point	20,000,000	13,580,000	DAU			100%	20,000,000
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kecamatan Banyuwesmi	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	7.6 Point	7.6 Point	0	0	DAU		Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	18,482,310
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kecamatan Banyuwesmi	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	7.6 Point	7.6 Point	15,000,000	15,000,000	DAU		Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	16,204,545
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kecamatan Banyuwesmi	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	7.6 Point	7.6 Point	0	0	DAU		Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	20,000,000

7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kecamatan Banyuwesmi	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	7.6 Point	7.6 Point	15,000,000	7,642,500	DAU		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	20,000,000
---	----	----	------	----	---	---------------------------------	--	------------------------------------	----------------------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----	--	---------------------------------	-------	------------

Sumber : RKPD Perubahan, SIPD 2023

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan pada RKPD dan atau Renja sebelumnya yang mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Renja Tahun 2023 juga dilakukan untuk merespon terjadinya i) kejadian luar biasa seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Kecamatan Pangatikan; ii) kejadian bencana alam seperti hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi; rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Samarang dan Pasirwangi; dukungan kegiatan prioritas nasional diantaranya kegiatan dukungan penanganan stunting di KODIM dan POLRES, pembangunan pasar rakyat Cikajang, pengelolaan Situ Bagendit; iv) pengalokasian gaji PPPK Kesehatan; v) penyesuaian belanja pemenuhan DAU yang diarahkan penggunaannya terutama DAU Bidang Pendidikan dan DAU Bidang Kesehatan; v) penyesuaian atas petunjuk DAK Fisik dan Non Fisik serta adanya kegiatan luncuran dan pergeseran anggaran SKPD.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023</i>	133

2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan Renja ini, maka seluruh jajaran pemerintahan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banyuresmi Tahun 2023</i>	134